

SIARAN PERS

Nomor: 23/HMS/SP/VIII/2026

TANGGAL:
14 Agustus 2026

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Perkuat Pengawasan Partisipatif untuk Wujudkan Pemilu Inklusif

Tilango, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Bawaslu Kabupaten Gorontalo memperkuat pengawasan partisipatif bersama kelompok disabilitas melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Kelompok Disabilitas yang dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Putra Mandiri, Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Gorontalo mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif sekaligus meningkatkan pemahaman dan keterlibatan kelompok disabilitas dalam proses demokrasi dan pengawasan pemilu.

Ketua Yayasan Putra Mandiri, Raden Sahi, menyampaikan bahwa kelompok disabilitas memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara, baik sebagai pemilih maupun untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, keterlibatan kelompok disabilitas dalam proses demokrasi perlu terus diperkuat.

"Kelompok disabilitas tidak hanya memiliki hak sebagai pemilih, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu," ujar Raden.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba menegaskan bahwa pemilu yang inklusif perlu didukung dengan pemenuhan aksesibilitas sesuai kebutuhan pemilih disabilitas. Menurutnya, setiap jenis disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga fasilitas dan bentuk pendampingan dalam menggunakan hak pilih harus disesuaikan.

Alexander juga menyoroti sejumlah kebutuhan aksesibilitas, termasuk ketersediaan huruf Braille, pendampingan bagi pemilih tunanetra, penerjemah bagi peserta tunarungu, serta penyediaan materi sosialisasi dalam bentuk yang lebih mudah diakses.

"Aksesibilitas dalam menggunakan hak pilih harus menjadi perhatian bersama agar pemilih disabilitas dapat menggunakan haknya secara bebas dan rahasia," tegas Alexander.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Under S. Lawani menjelaskan bahwa kelompok disabilitas merupakan salah satu kelompok pemilih rentan yang masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk dalam aspek pendataan pemilih. Potensi pemilih disabilitas terlewat dalam proses pendataan maupun pencocokan dan penelitian (coklit) menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan.

Selain hambatan administratif, Under menyebut masih terdapat hambatan fisik dan aksesibilitas di TPS, keterbatasan informasi, serta hambatan sosial dan stigma yang dapat memengaruhi penggunaan hak politik kelompok disabilitas.

"Pencegahan dilakukan sejak awal tahapan dengan memastikan kebutuhan penyandang disabilitas diperhatikan, termasuk dalam proses pendataan pemilih," kata Under.

Ia menambahkan, Bawaslu memiliki peran melalui pencegahan, pengawasan langsung, penindakan, dan pemberdayaan. Kelompok disabilitas juga didorong untuk terlibat sebagai pengawas partisipatif karena memiliki pengalaman langsung terhadap hambatan yang mereka hadapi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Zulfikar A. Uba mengajak masyarakat untuk tidak berhenti berperan setelah menggunakan hak pilih, tetapi turut mengawasi setiap tahapan pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi.

Zulfikar memperkenalkan prinsip 3T, yaitu Temukan, Tulis, dan Teruskan, sebagai langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ketika menemukan dugaan pelanggaran. Masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan, maupun melalui saluran pengaduan yang disediakan Bawaslu.

"Kalau menemukan dugaan pelanggaran, tidak harus disebar di media sosial. Masyarakat dapat langsung menyampaikannya kepada Pengawas TPS atau pengawas pemilu terdekat," ujar Zulfikar.

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengawasi berbagai tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara. Pengawasan tersebut termasuk memastikan pemilih disabilitas terdata dengan tepat, mengawasi potensi kampanye yang diskriminatif, serta memastikan aksesibilitas TPS terpenuhi.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo mendorong penguatan kolaborasi bersama kelompok disabilitas dan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Keterlibatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas

pengawasan, tetapi juga memastikan hak politik seluruh warga dapat terpenuhi secara setara, bebas dari diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip pemilu yang inklusif.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo
Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: humasbawaslukabgor@gmail.com
Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id